



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 2026

Sulis Winurini

Analisis Legislatif Ahli Madya
sulis.winurini@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada Rapat Badan Anggaran 21 Agustus 2026, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menjelaskan bahwa anggaran kesehatan 2026 ditetapkan sebesar Rp244 triliun. Angka ini meningkat 15,8 persen dibanding *outlook* Tahun Anggaran (TA) 2025 yang sebesar Rp210,6 triliun. Dari total alokasi tersebut, Rp123,2 triliun disiapkan untuk layanan kesehatan masyarakat. Porsi terbesar, yaitu Rp69 triliun, dialokasikan untuk subsidi iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mencakup 96,8 juta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan 49,6 juta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Sri Mulyani menegaskan keberlanjutan JKN ditentukan oleh besarnya manfaat yang diberikan kepada peserta. Semakin banyak manfaat, semakin besar pula biaya yang dibutuhkan. Hal ini menjadi alasan pemerintah menambah anggaran JKN pada 2026. Adapun rincian penggunaan anggaran akan dibahas bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Nota Keuangan RAPBN TA 2026 juga menyebutkan bahwa skema pembiayaan JKN perlu disusun secara komprehensif untuk menjaga keseimbangan antara tiga pilar utama, yaitu: (1) masyarakat/peserta; (2) pemerintah pusat; dan (3) pemerintah daerah. Untuk itu, penyesuaian iuran dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kondisi fiskal pemerintah. Pendekatan bertahap ini penting untuk meminimalisir gejolak sekaligus menjaga keberlanjutan program.

Beberapa pernyataan di atas mengindikasikan adanya sinyal penyesuaian iuran JKN di 2026. Terlebih mengingat semakin besarnya tekanan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan akibat peningkatan risiko klaim pada Semester I 2025. BPJS Kesehatan juga masih berjuang menghadapi beragam tantangan, mulai dari tingginya jumlah peserta nonaktif yang berpotensi akan meningkat sebagai dampak perlambatan ekonomi, *inclusion* dan *exclusion error* data peserta PBI yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara penerima manfaat dan kontribusi yang seharusnya dibayarkan, meningkatnya utilisasi layanan kesehatan untuk penyakit berbiaya tinggi, potensi kenaikan tarif layanan kesehatan, dan lain sebagainya. Menurut Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, apabila tidak ada langkah konkret, maka BPJS Kesehatan akan menghadapi defisit besar pada 2026. Sebagai gambaran, pada 2023 persentase beban jaminan kesehatan dibanding penerimaan iuran sebesar 106,18 persen. Kemudian pada 2024 persentase beban jaminan kesehatan dibanding penerimaan iuran mengalami kenaikan sebesar 109,62 persen.

Pascarapat tanggal 21 Agustus 2025 tersebut, wacana kenaikan iuran JKN terus berkembang di masyarakat. Pemerintah melalui Direktur Jenderal Anggaran, Luki Affirman, kemudian menegaskan tidak ada kenaikan iuran JKN pada 2026. Penambahan anggaran pada 2026 difokuskan untuk perbaikan layanan JKN. Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi, menambahkan bahwa masyarakat tidak akan menanggung kenaikan iuran, karena perubahan iuran hanya berlaku bagi peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang sepenuhnya dibiayai APBN dan pekerja bukan penerima upah (PBPU) Kelas III yang mendapat subsidi APBN. Dengan demikian, iuran PBPU dan bukan pekerja (BP) Kelas I dan II adalah tetap, sesuai Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden

Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yakni Rp150.000 untuk Kelas I dan Rp100.000 untuk Kelas II. Sementara besaran iuran Kelas III pada 2026 ditentukan berdasarkan besaran anggaran yang tersedia untuk PBI dan PBPU.

Selanjutnya, Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyebutkan bahwa DPR RI belum mendapat penjelasan dari pemerintah mengenai rincian rencana penyesuaian iuran JKN. Namun, Nurhadi menegaskan, pemerintah perlu memprioritaskan pembenahan pada manajemen dan tata kelola BPJS Kesehatan tanpa menambah beban rakyat. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, memastikan Komisi IX DPR RI akan segera mengadakan rapat kerja bersama pemerintah untuk meminta penjelasan yang rinci terkait penyesuaian iuran JKN pada 2026. Langkah ini menjadi langkah antisipatif DPR agar penambahan anggaran JKN 2026 menghadirkan layanan kesehatan yang lebih baik tanpa menambahkan beban masyarakat.

Atensi DPR

Komisi IX DPR RI perlu segera mengagendakan rapat bersama Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, DJSN untuk meminta penjelasan lebih rinci terkait peruntukan penambahan anggaran JKN 2026, termasuk penjelasan terkait skema penyesuaian iuran JKN 2026. Komisi IX DPR RI perlu memastikan kebijakan yang diambil pemerintah tidak menambah beban rakyat yang saat ini sedang menghadapi beragam tekanan ekonomi. Oleh karena itu, skema penyesuaian iuran JKN 2026 harus disertai kajian yang jelas dan rasional sehingga penambahan anggaran JKN 2026 dapat memberikan manfaat yang lebih besar untuk kepentingan rakyat. Rapat dengar pendapat pakar diperlukan untuk mendapat pandangan terkait skema pembiayaan BPJS Kesehatan yang sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Komisi IX DPR RI juga perlu mendorong BPJS Kesehatan untuk mengembangkan solusi terkait kolektivitas iuran kepesertaan, melakukan pembenahan terkait sistem data kepesertaan PBI untuk menjawab persoalan *inclusion* dan *exclusion error*. Dengan demikian, BPJS Kesehatan dapat meningkatkan penerimaan, tidak hanya bergantung pada kenaikan iuran peserta, dan dapat tepat sasaran dalam menetapkan peserta PBI.

Sumber

Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2026, Agustus 2025;
cnbc.com, 22 Agustus 2025;
kompas.id, 22 Agustus 2025;
tempo.co, 28 Agustus 2025;
youtube.com/banggardprri, 21 Agustus 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Uly Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*